

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian penulis menguraikan pembahasan ini menurut (Andrianto 2007;23 dalam Mutia dan Handayani 2018) Bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan Efektif dan efisien dengan: Menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public, Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, Menjelaskan dan bertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional dan Adanya sarana bagi public untuk menilai kinerja pemerintah.

1. Menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

Penerapan asas transparansi di desa oerinbesi dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara benar, jujur, cepat dan tepat adalah Desa Oerinbesi memasang papan informasi desa dan bersosialisasi mengadakan musrembangdes. Kemudian dari perencanaan yang sudah disepakati tersebut, pemerintah Desa melaksanakan beberapa program pembangunan, Namun terdapat juga program pembangunan yang pelaksanaannya belum diselesaikan, akibat dari pemerintah desa yang kekurangan dana dari anggaran yang sudah ditetapkan, Sehingga pembangunan harus dihentikan.

2. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public

pemerintah desa Oerinbesi dalam melaksanakan program alokasi dana desa selalu mengupayakan kepuasan dari masyarakat. Namun masyarakat merasa kesulitan dengan

pelayanan di kantor desa yang belum berjalan dengan efektif yang mana disaat masyarakat ingin membuat surat, harus mencari aparat desa akibat dari kelalaian dan kemalasan para aparat yang sering tidak masuk kantor, sehingga pelayanannya pun masih berbelit belit.

2. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan Pengelolaan ADD, Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti Musdes untuk memberikan aspirasinya masing –masing, serta selalu aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi maupun kegiatan fisik dalam hal pembangunan di desa. Namun masyarakat merasa kurang puas Karena apa yang sudah di usulkan belum sepenuhnya terjawab oleh pemerintah.

3. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional.

Dalam mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan pengelolaan ADD pemerintah Desa Oerinbesi selalu melaporkannya di setiap akhir tahun berjalan dalam bentuk laporan perencanaan pembukuan yang terdiri dari laporan realisasi, kas umum, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar, buku kas pengeluaran dan penerimaan, laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Namun terdapat kesulitan yaitu kurangnya SDM pemerintah desa Terkait mengelola teknologi computer sehingga pada saat membuat laporan administrasi selalu tumpang tindih pada satu dua orang aparat desa yang menguasai bidang tersebut, hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran APBDes di setiap akhir tahun berjalan.

4. Adanya sarana bagi public untuk menilai kinerja pemerintah.

sarana yang digunakan pemerintah desa Oerinbesi agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja dari pemerintah itu sendiri adalah dengan memasang papan informasi. Namun

masyarakat menilai kinerja dari pemerintah desa terkait pelaksanaan pengelolaan ADD kurang maksimal dimana terdapat beberapa program pembangunan yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah desa.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Desa Oerinbesi agar lebih mempertanggungjawabkan setiap program kegiatan pembangunan yang sudah di sepakati bersama dalam MusrembangDes, sehingga pelaksanaan dan pelaporan dalam setiap kegiatan ADD juga bisa berjalan secara efektif dan efisien.
2. Kepada Pemerintah Desa Oerinbesi agar membuat satu aturan tegas terkait dengan kedisiplinan dalam bekerja, terutama dalam ketepatan waktu berkantor sehingga harus diberikan sanksi yang tegas bagi perangkat desa yang melanggar, agar pelayanan di kantor desa dapat berjalan efektif dan masyarakatpun tidak kewalahan ketika membutuhkan pelayanan di kantor desa
3. Kepada Pemerintah Desa agar mengikuti pelatihan atau sosialisasi berkaitan dengan cara mengoprasi computer sehingga semua perangkat desa bisa mengakses computer dengan baik agar pengelolaan ADD dapat berjalan dan pelayanan di kantor desa tidak bergantung pada satu dua orang perangkat desa yang menguasai bidang tersebut.
4. Kepada Masyarakat Desa oerinbesi agar lebih aktif lagi dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan desa, sehingga Pengelolaan ADD dapat terlaksana sesuai dengan keinginan Masyarakat,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002 *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifianto, Dwi Febri dan Kurrohman, Taufik 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember*, Vol.2, N0.3, p.473-485, Universitas Jember
- Andrianto, 2007 *Good e-governance, Transparansi an akuntabilitas public melalui e-government*. Malang:Bayumedia Publishing
- Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta
- Fathah, Rigel Nurul.2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul). Vol. 2, No. 2, Universitas Aisyiyah Yogyakarta..
- Lestari, S.,& Waluyo, L. 2017.*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Wilayah Kecamatan Banyudono (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta)*.
- Mardiasmo, 2002.*Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mutia, D.R & Handayani, N. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA),7(8).
- Miles, M.B, dan Huberman, A.M. 2009.*Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia Press.Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda karya Offset. Bandung

Republik Indonesia.(2014).Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.Jakarta.

Romantis, P.A, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa* di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Ri'a, N.I & Handayani,N.2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. JIRA.

Rahmawati, 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep

Sanusi,A.2014. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Subroto,A.2009 *.Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa* di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008. Di publikasikan. Tesis.Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sudjana, 2011. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.

Sugiyono, 2008. “*Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&b*”.Bandung: Alfabeta.

Waluyo, 2009.*Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* Bandung CV Mandar Maju.

Sumber Lain:

Profil Desa Oerinbesi Tahun 2023

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Website:

<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-mohamad-zainul-aripin/> .

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2018/B.211.18.0149/B.211.18.0149-15-File-Komplit-20220213113536.pdf>.

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14243-Full_Text.pdf.

